



JOMBANG
SANTRI

RENSTRA TAHUN 2024-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN JOMBANG



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Nomor: 188/ /415.44/2023
Tanggal: 6 April 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kahadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026 ini disusun sesuai dengan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka Program dan Kegiatan pendanaan dan pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 s/d 2026 ini. Semoga dengan ditetapkannya perubahan ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan semua pihak sebagai mitra kerja.


**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

MUHAMMAD NASHRULLOH, SE. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680202 1999003 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR 15

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi 15

Gambar 5.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategis 50

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 10

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 16

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 46

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..... 46



3.2 Penentuan Isu-isu Strategis 50

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 53

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 55

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 62

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 85

7.1 Indikator Kinerja BPKAD 85

BAB VIII PENUTUP 87





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 ASN BPKAD Menurut Golongan dan Ruang	16
Tabel 2.2 ASN BPKAD Menurut Pendidikan Formal	16
Tabel 2.3 ASN BPKAD Menerut Eselon	17
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana	17
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tupoksi OPD dan Pencapaian Pelayanan Publik BPKAD	22
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD	25
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKAD ..	46
Tabel 3.2 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra KL	48
Tabel 3.3 Analisa Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026 yang Menjadi Tanggungjawab BPKAD	49
Tabel 3.4 Kriteria Manyengkut Isu-Isu Strategis	50
Tabel 3,5 Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas	50
Tabel 3.6 Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas	51
Tabel 3.7 Isu Strategis	52



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53
Tabel 5.1 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD	56
Tabel 5.2 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD	57
Tabel 5.3 Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategis.....	58
Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	61
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 s/d 2026	63
Tabel 6.2 Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD	84
Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	85
Tabel 7.2 Program Prioritas BPKAD Kab. Jombang Tahun 2024 s/d 2026	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau RENSTRA BPKAD Kabupaten Jombang adalah sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun periode perencanaan. Di dalam Renstra ini digambarkan dengan jelas tugas dan fungsi serta peran strategis BPKAD Kabupaten Jombang di dalam pembangunan daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis baik internal sistem maupun eksternal organisasi. Renstra BPKAD disusun dengan berpedoman pada Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri, Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja atau RENJA SKPD dan menjadi pedoman bagi penilaian kinerja instansi pemerintah oleh lembaga audit baik internal ataupun eksternal. Renstra ini dibuat berdasarkan kondisi riil organisasi dengan dinamika, permasalahan dan perkembangan yang begitu signifikan. Pelaksanaan penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut atas adanya Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu menjadi dokumen yang bisa menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja pelayanan dari hari ke hari.

Renstra disusun sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPD yang nantinya akan ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang disusun berdasarkan RENJA SKPD dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini nantinya akan berdampak pada sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA dengan RENSTRA dan RPD dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas program pembangunan periode Tahun 2024 s/d 2026.



Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang akan memutuskan program apa yang akan dijalankan oleh suatu organisasi perangkat daerah serta berapa jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. *Perumusan strategis* adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Jombang dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026, Tupoksi BPKAD Kabupaten Jombang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam hal mengelola keuangan dan aset pemerintah daerah. Renstra BPKAD Kabupaten Jombang juga dibuat dengan memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang serta berbagai Kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jombang, BPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehubungan dengan itu maka BPKAD Kabupaten Jombang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang serta tetap memperhatikan kebijakan dari Kabupaten yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sinkronisasi Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian/Lembaga juga harus dilakukan, untuk itu Renstra BPKAD Kabupaten Jombang juga merujuk pada Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 – 2024. Merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia memiliki dampak perekonomian yang perlu diantisipasi dan direspons. Dalam menangani permasalahan ini diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sejalan dengan instruksi tersebut dilakukan *refocusing*, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD oleh BPKAD Kabupaten Jombang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, kementerian keuangan menetapkan 7 (tujuh) tujuan dan telah dilengkapi dengan 16 (enam belas) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Keuangan dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Tujuan atau sasaran strategis dalam Renstra K/L yang juga merupakan tujuan atau sasaran strategis dari Renstra BPKAD yang merujuk pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/KM.6/2022 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022. Dengan Indikator kinerja Indeks Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD. Dimana Opini BPK ini terbagi kedalam 4 (empat) skala yakni :

- Skala 1 : Tidak wajar (*Adverse*)
- Skala 2 : Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)
- Skala 3 : Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified*)
- Skala 4 : Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Dalam hal ini Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang adalah WTP (Skala 4), Kabupaten Jombang tercatat telah menerima sembilan kali perolehan WTP hingga tahun 2022. Dengan demikian telah terjadi sinkronisasi antara Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

Selain harus selaras dengan Renstra K/L, Renstra BPKAD juga harus sejalan dengan Renstra Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini pengelolaan keuangan daerahnya ditangani oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam Renstra tersebut disebutkan bahwa tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota yang partisipatoris di Jawa Timur. Hal tersebut menjelaskan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan arahan dan koordinasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah bagi Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur. Namun dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dijelaskan secara mendetail tentang bagaimana menilai kinerja dari pengelolaan keuangan tersebut untuk mendapatkan Opini BPK.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang dilakukan untuk mewujudkan Rancangan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun Undang – undang dan peraturan yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kalidengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 13); dan
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20216 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D).
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 72/D).
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 10).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan yang merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja BPKAD Kabupaten Jombang dan digunakan untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat visi, misi, tujuan,



sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode tiga tahun (2024 s/d 2026). Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal oleh BPKAD setiap tahunnya, guna mendukung terwujudnya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAD beserta indikator kinerja utama BPKAD sebagai bentuk tolak ukur pertanggungjawaban kepala BPKAD sebagai pengemban amanah kepada Bupati Jombang sebagai pemberi amanah.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2024 s/d 2026 memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan tiga tahun BPKAD untuk mendukung terwujudnya visi, misi, program pembangunan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dan bersinergis dengan visi, misi dan indikator kinerja dari sasaran strategis BPKAD;
2. Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan beserta kerangka kebutuhan pendanaan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan BPKAD terhadap capaian target indikator kinerja setiap tahun dalam kurun tahun 2024 s/d 2026;
4. Sebagai dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja Kepala BPKAD untuk mewujudkan target kinerja dari indikator Utama (IKU) yang dijanjikan dalam periode waktu satu tahun; dan
5. Sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh BPKAD pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Naskah Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan



- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH**
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
- Bab ini berisi rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- Bab ini berisi strategi dan kebijakan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana telah dirumuskan.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPD.
- BAB VIII : PENUTUP**
- Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan tiga tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang membawahi satu sekretariat dan tiga bidang di dalam struktur organisasinya. Penjabaran mengenai tugas dan fungsi setiap komponen kepemimpinan yang ada di BPKAD adalah sebagai :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Badan;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dibidang perencanaan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi anggaran serta pengolahan data dan informasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, bidang anggaran memiliki fungsi :

- a. Penyusunan pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam rangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- b. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Melakukan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- f. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan Pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah;
- g. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan;
- h. Penyusunan Analisis Standar Belanja;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, di bidang akuntansi, penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang

perbendaharaan memiliki fungsi :

- a. Perumusan sistem dan prosedur akuntansi;
- b. Perumusan kebijakan akuntansi;
- c. Pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penerbitan SP2D berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BUMD dan BLUD atas penyusunan pelaporan keuangan daerah;
- f. Pelaksanaan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- h. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah;
- j. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dalam pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- k. Pelaksanaan rekonsiliasi dengan Bank/ Lembaga/ Pemerintah;
- l. Pelaksanaan koordinasi Tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah;
- m. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang lainnya yang telah ditunjuk;
- n. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- o. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- p. Pelaksanaan penatausahaan gaji pegawai daerah;
- q. Penatausahaan belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Bidang Aset

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bidang analisis kebutuhan dan perencanaan, penatausahaan dan sistem informasi serta pengelolaan dan pengendalian aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang Aset Daerah memiliki fungsi :

- a. Pengelolaan aset secara efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, norma, pedoman standar, prosedur, petunjuk teknis pengelolaan aset;
- c. Penyiapan penetapan pedoman tentang pengelolaan aset Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan dan penyajian data, laporan serta catatan atas laporan barang/ aset daerah;
- e. Pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sistem dan mekanisme pengelolaan aset daerah;
- f. Pelaporan hasil realisasi pengadaan daerah maupun yang diperoleh dari kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
- g. Penyelenggaraan administrasi operasional aset secara tertib, pengembangan manajemenserta kebijakan strategis aset daerah;
- h. Penyelenggaraan optimalisasi dan evaluasi aset;
- i. Penyelenggaraan pengamanan hukum atas tanah aset pemerintahan;
- j. Penyiapan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah;
- k. Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk kelancaran tugas dan pelaksanaan kegiatan di BPKAD seringkali dilaksanakan rapat internal sesuai dengan acara yang akan dilaksanakan. Sehingga sebelum pelaksanaan acara, panitia dalam hal ini BPKAD selaku penyelenggara kegiatan memiliki kesiapan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan yang berkualitas sesuai dengan asas profesionalisme.



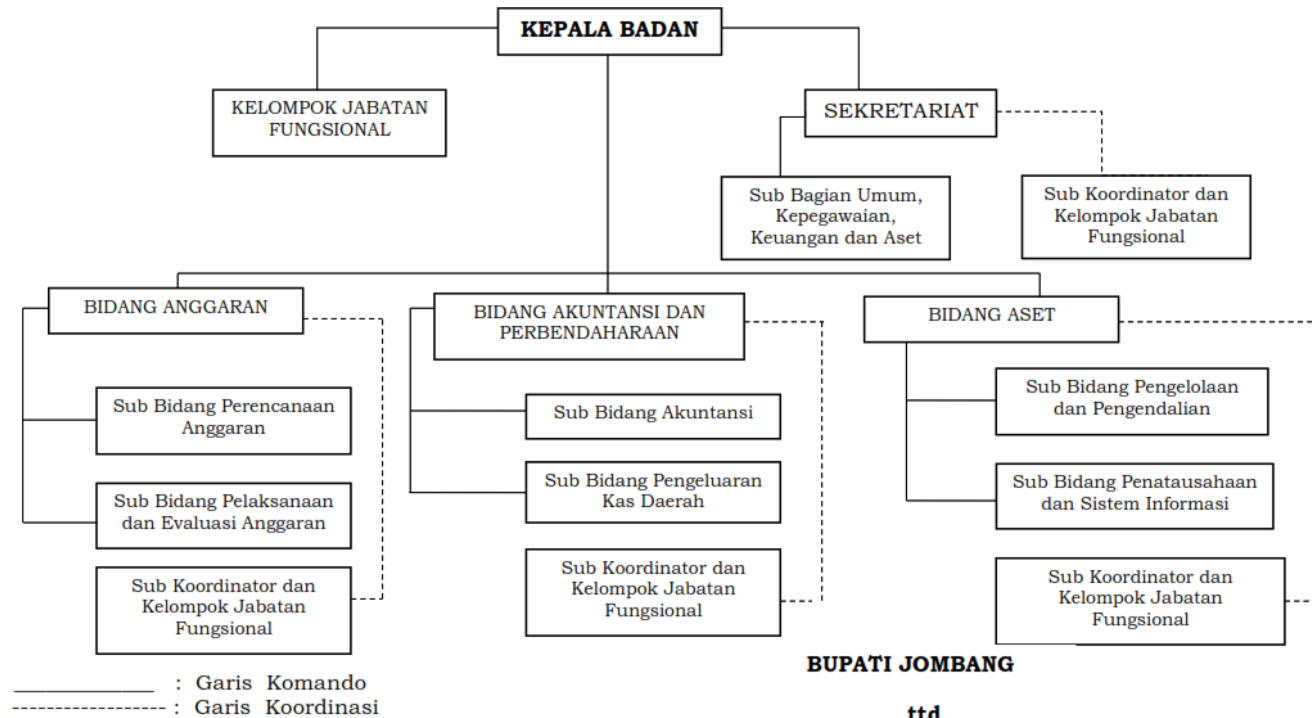
Hanya saja sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbatas seringkali dihadapkan pada volume kerja yang cukup banyak dengan tuntutan penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang singkat/ cepat sehingga hal ini menimbulkan ASN dengan beban pekerjaan yang melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga seringkali dilakukan bekerja diluar dari jam kerja penyelesaian pekerjaan yang belum selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu kiranya penambahan staf untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi penyelenggara keuangan dan aset daerah yang cukup kompleks di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

Selanjutnya uraian tugas dari masing-masing pejabat sesuai susunan organisasi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang seperti yang tercantum dalam Gambar 2.1.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 72 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG



BUPATI JOMBANG

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

D:\HUKUM 2\PERATURAN BUPATI\2022\6. BPKAD [done].doc



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, maka diperlukan adanya dukungan baik berupa Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarannya. Adapun sumber daya yang dimiliki tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Kepegawaian

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Januari 2023 ASN di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang berjumlah 44 (empat puluh empat) dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan/ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 ASN BPKAD menurut Golongan dan Ruang

NO.	Golongan/Ruang	Jumlah (org)
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
2	Pembina (IV/a)	7
3	Penata Tingkat I (III/d)	5
3	Penata (III/c)	2
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3
5	Penata Muda (III/a)	9
6	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
7	Pengatur (II/c)	11
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
	JUMLAH	44

(Data per 31 Januari 2023)

- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 ASN BPKAD menurut pendidikan formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	S – 3 (Doctoral)	-
2	S – 2 (Pasca Sarjana)	11



3	S – 1 (Sarjana)	16
4	D – 3 (Diploma 3)	11
5	SMA	6
JUMLAH		44

(Data per 31 Januari 2023)

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Esselon adalah seabadaí berikut :

Tabel 2.3 ASN BPKAD menurut eselon

No.	Eselonisasi	Jumlah (orang)
1	Kepala Badan (Eselon II/b)	1
2	Sekretaris (Eselon III/a)	1
3	Kepala Bidang (Eselon II/bl)	3
4	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	9
JUMLAH		14

(Data per 31 Januari 2023)

2.2.1. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKAD Kabupaten Jombang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4 Sarana dan prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	CUKUP BAIK	RUSAK BERAT	
1	Tanah bangunan kantor pemerintahan	3	3			
2	Tanah lapangan olahraga	2	2			
3	Transportable Generating	1	1			
4	Stationary Generating Set	1	1			
5	Portable Water Pump	1	1			
6	Pompa Air	1	1			
7	Station Wagon	4	4			
8	Sepeda Motor	23	22			1
9	Scooter	3	3			
10	Alat Ukur Lainnya	4	3			1



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	CUKUP BAIK	RUSAK BERAT	
11	Mesin Tik Manual (14-16)	2	1		1	
12	Rak Besi / Metal	37	37			
13	Rak Kayu	1	1			
14	Filling Besi / Metal	8	8			
15	Filling Kayu	1			1	
16	Brankas	4	4			
17	Alat Penghancur Kertas	3	2		1	
18	White Board	2			2	
19	Mesin Absensi	1	1			
20	Alat pemotong kertas	2			2	
21	Lemari Kayu	15	14		1	
22	Rak Kayu	12	12		1	
23	Kursi Besi / Metal	62			62	
24	ZICE	1	1			
25	Meja Rapat	13	13			
26	Kursi Rapat	20	20			
27	Meja Tulis	35	34		1	
28	Meja Telepon	1	1			
29	Meja Resepsionis	1	1			
30	Meja Panjang	2			2	
31	Kursi Rapat	32	12		20	
32	Kursi Tamu	2	2			
33	Kursi Tangan	15	4		11	
34	Kursi Putar	15	15			
35	Kursi Biasa	23	23			
36	Bangku Tunggu	4	4			
37	Meja Komputer	1	1			
38	Sofa	1	1			
39	Karpet	6	6			
40	Lemari Es	2	2			
41	Ac Unit	4	4			
42	Ac Split	20	16		4	
43	Kompor Gas	1	1			
44	Tabung Gas	2	2			
45	Televisi	8	5		3	
46	Ware Less	1	1			
47	Unit Power Supply	7	6		1	
48	Tangga Almunium	1	1			
49	Dispenser	4	4			
50	Handy Cam	1	1			
51	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1			
52	Lampu Hias	13			13	
53	Alat Pembantu Pmd. Kebakaran	2	2			
54	Local Area Network (LAN)	1			1	
55	Komputer Unit /	10	10			



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	CUKUP BAIK	RUSAK BERAT	
	Jaringan Lainnya					
56	P.C. Unit	53	48		5	
57	Note Book	31	25		6	
58	Monitor	2	2			
59	Printer	56	44		12	
60	Server	5	4		1	
61	Router	6	6			
62	Hub.	1	1			
63	Peralatan Jaringan Lainnya	3	3			
64	Card Wirelaess LAN	2	2			
65	Acces Point	1	1			
66	Software	6	6			
67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3			
68	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	10			
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1			
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4			
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	7			
72	Lemari & Arsip Pejabat Lainnya	2	2			
73	Camera+Attachm ent	3	3			
74	Proyektor+Attach ment	3	3			
75	Peralatan Studio Visual	2	2			
76	Telephone (Pabx)	1	1			
77	Faksimile	1	1			
78	Gedung Kantor Permanen	4	4			
79	Gudang Tertutup Permanen	2	2			

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset/barang milik daerah sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah Kabupaten Jombang. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas bahwa BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok serta fungsi yang ditangani adalah pada sektor pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah berdasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penganggaran

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran (SIPD) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Penatausahaan dan Pelaporan

Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yakni Bank Jatim Cabang Martapura. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi komputer SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah).

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga diberi amanah untuk mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur serta mengendalikan tugas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang perencanaan dan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pengendalian dan penghapusan aset daerah. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset dan kedepan akan dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi geografis manajemen aset (SIG-Aset Jombang). Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang.



Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran barang daerah.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tupoksi OPD dan
Pencapaian Pelayanan Publik BPKAD

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikat or Lainnya	Tahun Dasar (2018)	Target RENSTRA SKPD Tahun ke -			Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan non pendapatan) = 82 %	100%	100%	74,5	75,00	75,25	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
2	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	60,00	62,00	64,00	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Nilai SAKIP	100%	100%	80,3	80,4	80,5	A	BB	A	-	-	100%	100%	100%	-	-
4.	IKM	100%	100%	94,00	94,10	94,20	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-



Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang selama periode 2019-2023 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.1 tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas, penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing;
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa- apa kenapa sekarang tidak bisa;
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang, dan antar SKPD masih belum dapat dilakukan lebih intens ;
5. Belum optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti workshop, diklat, kursus dan bintek baik formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja di BPKAD yang relatif tinggi.



2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang meliputi internal BPKAD Jombang, OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, serta pihak lain yang terlibat dan berkepentingan terhadap pelaksanaan Tupoksi BPKAD. Adapun dari penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada Renstra BPKAD Jombang diuraikan lewat tabel berikut:

Tabel 2.6
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	75%	0,95	548.211.584.693	0,96	548.528.192.743	0,97	548.798.881.156	0,97	1.645.538.658.592
				Skor Kesesuaian pengalokasian anggaran belanja	75%	1,00		1,00		1,00		1,00	
				Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	75%	0,84		0,85		0,86		0,87	
				Skor penyerapan anggaran	75%	0,76		0,77		0,78		0,79	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Skor Opini BPK atas LKPD	0%	1,00		1,00		1,00		1,00	
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program RKPD dan KUA-PPAS;	100%	100%	1.758.136.800	100%	2.029.988.100	100%	2.227.296.513	100%	6.015.421.413
				Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program KUA_PPAS dan APBD;	30%	100%		100%		100%		100%	
				Prosentase Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan	100%	83%		84%		85%		85%	
				Prosentase Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.	30%	91%		92%		93%		94%	
				Tingkat ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan RPAPBD ke DPRD tepat waktu	30%	100%		100%		100%		100%	
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	2 Dokumen	38.266.000	2 Dokumen	44.005.900	2 Dokumen	47.832.500	6 Dokumen	130.104.400



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	2 Dokumen	37.731.000	2 Dokumen	43.390.650	2 Dokumen	47.163.750	6 Dokumen	128.285.400
		5.02.02.2.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	100 dokumen	1.999.900	100 dokumen	2.854.900	100 dokumen	3.424.900	300 dokumen	8.279.700
		5.02.02.2.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	105 Dokumen	1.999.900	105 Dokumen	3.541.150	105 Dokumen	4.568.650	315 Dokumen	10.109.700
		5.02.02.2.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	100 dokumen	49.279.900	100 dokumen	64.321.900	100 dokumen	74.349.900	300 dokumen	187.951.700
		5.02.02.2.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	105 Dokumen	135.531.000	105 Dokumen	154.544.250	105 Dokumen	167.219.750	315 Dokumen	457.295.000
		5.02.02.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	2 Dokumen	576.354.000	2 Dokumen	662.807.100	2 Dokumen	720.442.500	6 Dokumen	1.959.603.600



Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	2 Dokumen	658.988.000	2 Dokumen	757.837.000	2 Dokumen	823.735.000	6 Dokumen	2.240.560.000
		5.02.02.2.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	85%	2 Dokumen	59.490.000	2 Dokumen	68.413.500	2 Dokumen	85.516.875	6 Dokumen	213.420.375
		5.02.02.2.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	2 Dokumen	8.930.000	2 Dokumen	10.269.500	2 Dokumen	12.836.875	6 Dokumen	32.036.375
		5.02.02.2.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	2 Dokumen	6.420.000	2 Dokumen	7.383.000	2 Dokumen	9.228.750	6 Dokumen	23.031.750
		5.02.02.2.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100%	2 Dokumen	10.895.000	2 Dokumen	12.529.250	2 Dokumen	15.661.563	6 Dokumen	39.085.813



Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0%	85 Peserta	172.252.100	85 Peserta	198.090.000	85 Peserta	215.315.500	255 Peserta	585.657.600
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja SKPD	75%	77%	242.595.500	78%	242.595.500	78%	242.595.500	78%	727.786.500
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	71,43%	112 dokumen	18.948.000	112 dokumen	18.948.000	112 dokumen	18.948.000	336 dokumen	56.844.000
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	63,48%	10000 dokumen	51.354.000	10050 dokumen	51.354.000	10050 dokumen	51.354.000	30100 dokumen	154.062.000
		5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100%	5 dokumen	9.354.000	5 dokumen	9.354.000	5 dokumen	9.354.000	15 dokumen	28.062.000



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	9 dokumen	5.250.000	9 dokumen	5.250.000	9 dokumen	5.250.000	27 dokumen	15.750.000
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%	7074 Laporan	3.857.500	7074 Laporan	3.857.500	7074 Laporan	3.857.500	21222 Laporan	11.572.500



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	100%	11 Dokumen	5.866.000	11 Dokumen	5.866.000	11 Dokumen	5.866.000	11 Dokumen	17.598.000
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	75%	200 dokumen rekon	74.436.000	200 dokumen rekon	74.436.000	200 dokumen rekon	74.436.000	600 dokumen rekon	223.308.000



Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (sigma <i>output</i>) Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2 .02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan	100%	4 (kali) kegiatan coaching, 1 dokumen pelaksanaan APBD	73.530.00 0	4 (kali) kegiatan coaching, 1 dokumen pelaksanaan APBD	73.530.00 0	4 (kali) kegiatan coaching, 1 dokumen pelaksanaan APBD	73.530.00 0	12 (kali) kegiatan coaching, 3 dokumen pelaksanaan APBD	220.590.00 0
		5.02.02. 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase rata- rata realisasi belanja Bantuan Keuangan, BTT dan Dana Bagi Hasil	100%	100%	545.522.4 84.143	100%	545.522.4 84.143	100%	545.522.4 84.143	100%	1.636.567. 452.429
		5.02.02.2 .04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	12 Laporan	509.734.3 40.053	12 Laporan	509.734.3 40.053	12 Laporan	509.734.3 40.053	100%	1.529.203. 020.159
		5.02.02.2 .04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	1 Laporan	19.958.81 4.109	1 Laporan	19.958.81 4.109	1 Laporan	19.958.81 4.109	100%	59.876.442 .327
		5.02.02.2 .04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	1 Laporan	15.829.32 9.981	1 Laporan	15.829.32 9.981	1 Laporan	15.829.32 9.981	100%	47.487.989 .943



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase OPD yang menyusun LK OPD tepat waktu	100%	76%	688.368.250	77%	733.125.000	78%	806.505.000	78%	2.227.998.250
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%	12 dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6.760.000	12 dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7.436.000	12 dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8.179.000	12 dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	22.375.000
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%	4 dokumen rekonsiliasi LRA-LO-Neraca SKPD	6.010.000	4dokumen rekonsiliasi LRA-LO-Neraca SKPD	6.600.000	4 dokumen rekonsiliasi LRA-LO-Neraca SKPD	7.300.000	4 dokumen rekonsiliasi LRA-LO-Neraca SKPD	19.910.000
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	16 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Tribulanan dan Semester	5.060.000	16 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Tribulanan dan Semester	5.566.000	16 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Tribulanan dan Semester	6.150.000	16 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Tribulanan dan Semester	16.776.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100%	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	82.232.300	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	90.455.000	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	99.500.000	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	272.187.300
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	240.664.000	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	240.664.000	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	264.730.000	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	746.058.000



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.03.09	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	91.950.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.145.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	111.260.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	304.355.000
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	139.990.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	153.989.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	169.387.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	463.366.000
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50%	2 bimtek dan 1 rapat teknis	115.701.950	2 bimtek dan 1 rapat teknis	127.270.000	2 bimtek dan 1 rapat teknis	139.999.000	2 bimtek dan 1 rapat teknis	382.970.950



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu	75%	93%	2.590.258.650	94%	2.738.546.760	95%	2.805.101.303	95%	8.133.906.713
				Peningkatan capaian pemanfaatan aset	75%	13%		14%		15%		15%	-
				Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	75%	11%		12%		13%		13%	-
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang tertib tata kelola BMD	51,18%	86%	2.590.258.650	87%	2.738.546.760	88%	2.805.101.303	88%	8.133.906.713
				Prosentase pengelolaan aset yang dimanfaatkan	92,31%	66%		67%		68%		68%	-
				Prosentase pengajuan sertifikasi aset daerah	100%	41%		42%		43%		43%	-
				Prosentase aset daerah yang terinventarisasi dalam laporan BMD tematik tahunan	100%	66%		67%		68%		68%	-



Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100%	150 Dokumen SSH Reguler dan dokumen SSH PAPBD, Jasa konsultasi untuk SSH Reguler dan SSH PAPBD	199.075.000	75 SSH Reguler, 75 SSH PAPBD, Jasa konsultasi untuk SSH Reguler dan SSH PAPBD	199.075.000	75 SSH Reguler, 75 SSH PAPBD, Jasa konsultasi untuk SSH Reguler dan SSH PAPBD	199.075.000	450 SSH Reguler dan SSH PAPBD, Jasa konsultasi untuk SSH Reguler dan SSH PAPBD	597.225.000
		5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	70 Cetak SBSK, Biaya jasa konsultasi	65.750.000	70 Cetak SBSK, Biaya jasa konsultasi	65.750.000	70 Cetak SBSK, Biaya jasa konsultasi	65.750.000	210 Cetak SBSK, Biaya jasa konsultasi	197.250.000
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	1 Dokumen RKBMD	23.012.500	1 Dokumen RKBMD	23.012.500	1 Dokumen RKBMD	23.012.500	3 Dokumen RKBMD	69.037.500
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	2 dokumen perbub, narasumber	90.700.000	2 dokumen perbub, narasumber	90.700.000	2 dokumen perbub, narasumber	90.700.000	6 dokumen perbub, narasumber	272.100.000
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	75%	2 Laporan Semesteran Penatausahaan BMD	286.024.000	2 Laporan Semesteran Penatausahaan BMD	381.191.200	2 Laporan Semesteran Penatausahaan BMD	495.548.560	6 Laporan Semesteran Penatausahaan BMD	1.162.763.760
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	100%	1 Laporan Hasil Inventarisasi BMD	29.799.000	1 Laporan Hasil Inventarisasi BMD	29.799.000	1 Laporan Hasil Inventarisasi BMD	29.799.000	3 Laporan Hasil Inventarisasi BMD	89.397.000



Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	450 Laporan	1.008.270.000	450 Laporan	1.008.270.000	450 Laporan	891.410.000	1350 Laporan	2.907.950.000
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100%	5 Dokumen Penilaian	328.948.450	5 Dokumen Penilaian	328.948.450	5 Dokumen Penilaian	328.948.450	15 Dokumen Penilaian	986.845.350
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1 Laporan	37.735.000	1 Laporan	37.735.000	1 Laporan	37.735.000	3 Laporan	113.205.000
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	1 Dokumen	343.875.000	1 Dokumen	343.875.000	1 Dokumen	343.875.000	3 Dokumen	1.031.625.000
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	70%	4 Laporan	30.220.000	4 Laporan	39.286.000	4 Laporan	51.071.800	12 Laporan	120.577.800



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100%	4 Laporan	21.548.700	4 Laporan	28.013.310	4 Laporan	36.417.303	12 Laporan	85.979.313
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	97 Orang	125.301.000	97 Orang	162.891.300	97 Orang	211.758.690	291 Orang	499.950.990
		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	75%	100%	51.111.483.762	100%	50.881.483.762	100%	50.901.483.762	100%	152.894.451.286
		x.xx.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	75%	100%	90.000.000	100%	110.000.000	100%	130.000.000	100%	330.000.000
		x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75%	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	70.000.000	6 Dokumen	180.000.000
		x.xx.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	5 Laporan	40.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	60.000.000	15 Laporan	150.000.000



Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	75%	100%	49.031.983.576	100%	49.031.983.576	100%	49.031.983.576	100%	147.095.950.728
		x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75%	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS untuk 12 bulan	48.562.801.576	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS untuk 12 bulan	48.562.801.576	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS untuk 12 bulan	48.562.801.576	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS untuk 36 bulan	145.688.404.728
		x.xx.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75%	4 Dokumen Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Jasa Pengelolaan BMD	461.682.000	4 Dokumen Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Jasa Pengelolaan BMD	461.682.000	4 Dokumen Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Jasa Pengelolaan BMD	461.682.000	12 Dokumen Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Jasa Pengelolaan BMD	1.385.046.000



Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75%	1 Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan lampiran pendukungnya	2.500.000	1 Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan lampiran pendukungnya	2.500.000	1 Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan lampiran pendukungnya	2.500.000	3 Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan lampiran pendukungnya	7.500.000
		x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75%	18 Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan prognosis	5.000.000	18 Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan prognosis	5.000.000	18 Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan prognosis	5.000.000	54 Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan prognosis	15.000.000
		x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	75%	100%	1.339.500.000	100%	1.339.500.000	100%	1.339.500.000	100%	4.018.500.000
		x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75%	3 Paket Pemeliharaan jaringan listrik dan telekomunikasi	25.000.000	3 Paket Pemeliharaan jaringan listrik dan telekomunikasi	25.000.000	3 Paket Pemeliharaan jaringan listrik dan telekomunikasi	25.000.000	9 Paket Pemeliharaan jaringan listrik dan telekomunikasi	75.000.000



Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75%	5 Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	722.500.000	5 Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	722.500.000	5 Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	722.500.000	15 Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.167.500.000
		x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75%	4 Paket penyediaan peralatan rumah tangga	130.000.000	4 Paket penyediaan peralatan rumah tangga	130.000.000	4 Paket penyediaan peralatan rumah tangga	130.000.000	12 Paket penyediaan peralatan rumah tangga	390.000.000
		x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75%	4 Paket penyediaan bahan bakar minyak dan makanan/minuman rapat, jamuan tamu dan penambah daya tahan tubuh	285.000.000	4 Paket penyediaan bahan bakar minyak dan makanan/minuman rapat, jamuan tamu dan penambah daya tahan tubuh	285.000.000	4 Paket penyediaan bahan bakar minyak dan makanan/minuman rapat, jamuan tamu dan penambah daya tahan tubuh	285.000.000	12 Paket penyediaan bahan bakar minyak dan makanan/minuman rapat, jamuan tamu dan penambah daya tahan tubuh	855.000.000
		x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	75%	3 Paket barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	3 Paket barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	3 Paket barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	9 Paket barang cetakan dan penggandaan	66.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (sigma <i>output</i>) Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		x.xx.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan yang Disediakan	75%	2 Dokumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	10.000.00 0	2 Dokumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	10.000.00 0	2 Dokumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	10.000.00 0	6 Dokumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	30.000.000
		x.xx.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75%	1 Laporan penyelengga raan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	145.000.0 00	1 Laporan penyelengga raan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	145.000.0 00	1 Laporan penyelengga raan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	145.000.0 00	3 Laporan penyelengga raan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	435.000.00 0
		x.xx.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	75%	100%	650.000.0 00	100%	400.000.0 00	100%	400.000.0 00	100%	1.450.000. 000
		x.xx.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75%	10 Unit Pembaharua n sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	650.000.0 00	10 Unit Pembaharua n sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	400.000.0 00	10 Unit Pembaharua n sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	400.000.0 00	30 Unit Pembaharua n sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	1.450.000. 000
		x.xx.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	75%	100%	315.000.0 00	100%	365.000.0 00	100%	365.000.0 00	100%	1.045.000. 000



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75%	1 Laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	1 Laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	1 Laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	3 Laporan penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75%	2 Laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	200.000.000	2 Laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	250.000.000	2 Laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	250.000.000	6 Laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	700.000.000
		x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75%	3 Laporan pembayaran jaminan kesehatan, pajak, bea dan perizinan	110.000.000	3 Laporan pembayaran jaminan kesehatan, pajak, bea dan perizinan	110.000.000	3 Laporan pembayaran jaminan kesehatan, pajak, bea dan perizinan	110.000.000	9 Laporan pembayaran jaminan kesehatan, pajak, bea dan perizinan	330.000.000
		x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	75%	100%	405.000.000	100%	405.000.000	100%	410.000.000	100%	1.220.000.000
		x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75%	24 unit pembayaran pajak berkala kendaraan dinas roda 2	40.000.000	24 unit pembayaran pajak berkala kendaraan dinas roda 2	40.000.000	24 unit pembayaran pajak berkala kendaraan dinas roda 2	40.000.000	72 unit pembayaran pajak berkala kendaraan dinas roda 2	120.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		x.xx.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75%	5 unit pembayaran pajak, perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	110.000.000	5 unit pembayaran pajak, perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	110.000.000	5 unit pembayaran pajak, perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	110.000.000	15 unit pembayaran pajak, perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	330.000.000
		x.xx.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	75%	2 Unit pemeliharaan gedung kantor dan record center	130.000.000	2 Unit pemeliharaan gedung kantor dan record center	130.000.000	2 Unit pemeliharaan gedung kantor dan record center	130.000.000	6 Unit pemeliharaan gedung kantor dan record center	390.000.000
		x.xx.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	75%	10 unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	125.000.000	10 unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	125.000.000	10 unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	130.000.000	30 unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	380.000.000



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024-2026 sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BPKAD Kabupaten Jombang yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Keuangan Belum Optimal	Sistem Pengelolaan Keuangan Belum Berjalan Secara Optimal	SIPD sampai saat ini masih sering mengalami masalah (<i>trouble</i>). Hasil <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) di provinsi tahun 2023 disediakan server oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
			Kurang cermatnya OPD menyusun RKA dan anggaran kas sehingga sering terjadi usulan perubahan atau pergeseran anggaran kas yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan di OPD
			SDM pengelola keuangan di OPD belum seluruhnya



			memahami terhadap mekanisme perencanaan anggaran dan penatausahaan keuangan
			Belanja modal yang disusun pada APBD Murni oleh OPD masih banyak dilakukan penyerapan pada akhir tahun
			Masih banyak OPD yang melakukan realisasi anggaran belanja modal yang tidak sesuai dengan ketentuan tetapi tetap direalisasi hanya dengan melampirkan surat pernyataan
			Kurangnya koordinasi antara pengurus barang dengan PPTK, PPK SKPD, PPK, dan sungram terhadap realisasi pengadaan Belanja modal
			Masih adanya kesalahan yang krusial yakni pembebanan barang habis pakai atau belanja pemeliharaan namun dianggarkan di Belanja modal
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai	Belum dapat mewujudkan <i>good governance</i> dalam tata kelola Barang Milik Daerah	SDM pengurus barang di OPD belum seluruhnya kompeten sehingga mengakibatkan keterlambatan laporan rekonsiliasi barang
			Masih banyak aset daerah yang belum bersertifikat sehingga capaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD belum bisa 100%

Selain beberapa permasalahan tersebut diatas, juga dapat digambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Jombang terutama di BPKAD Kabupaten Jombang dimana pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodir, disosialisasikan dan diimplementasikan di Kabupaten Jombang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset di daerah. Secara garis besar, permasalahan di BPKAD Kabupaten Jombang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi, manajemen aset daerah



dan teknologi informasi yang berkinerja baik, profesional dan penuh tanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya *accrual basis accounting* di instansi pemerintah.

2. Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Jombang dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan Kabupaten Jombang tetap bisa mempertahankan *Opini WTP* atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah. Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek ini adalah pentingnya manajemen aset daerah/ barang milik daerah ditingkatkan kinerjanya dan harus menjadi hal yang sangat prioritas untuk dibenahi, sebab bila laporan dari bidang aset mengalami keterlambatan atau tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga aset daerah merupakan hal penting dalam penyusunan LKPD atau Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Tabel 3.2 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/ Kota	Sasaran pada Renstra ProvinsiJatim	Sasaran pada Renstra K/L
1	Nilai Capaian Kinerja Pengelolaan keuangan/ Indeks Opini BPK terhadap keuangan pemerintah	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Jombang	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan provinsi Jatim	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di Kementerian/ Lembaga



Tabel : 3.3 Analisa Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026 yang Menjadi Tanggungjawab BPKAD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD c. Peningkatan Legalisasi Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan non pendapatan) = 82 % Indeks Pengelolaan Aset Daerah	WTP	WTP		Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum



3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.4 Tabel Kriteria Menyangkut Isu – Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
(1)	(2)	(3)
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran RPD Kabupaten	30
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD	20
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik/SKPD	15
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
Total		100

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu SKPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, Nilai bobot kriteria dikalikan nilai Skala prioritas, sebagai berikut:

- 1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ;
- 2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ;
- 3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ;
- 4. Nilai 4 untuk skala prioritas;
- 5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.

Tabel 3.5 Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No	Isu Strategis/Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap KriteriaKe-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Upaya pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, dll	4	4	3	3	4	18
2.	Mengupayakan penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu	5	5	4	4	5	23
3.	Mengupayakan rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu	3	3	3	3	4	16
4.	Mengupayakan peningkatan penilaian MCP KPK terhadap perencanaan dan penganggaran sebesar 100% dan pengelolaan BMD sebesar 95%	4	5	4	4	3	20
5.	Adanya perubahan Peraturan Bupati yang mengatur Tupoksi	2	2	2	2	3	11



	BPKAD yang sebelumnya berdasarkan pada Perbup 64 Tahun 2020 diubah menjadi Perbup 72 Tahun 2021						
6.	Peningkatan pelayanan dalam percepatan penerbitan SP2D	3	3	3	3	4	16
7.	Upaya peningkatan kapasitas SDM pengurus barang dan pengelola keuangan secara terus menerus dan berkelanjutan	4	4	3	3	4	18
8.	Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5	5	4	4	4	22

Tabel 3.6 Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No	Isu Strategis	Nilai Skala Terhadap KriteriaKe-					Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Upaya pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, dll	120	80	45	60	60	365	73
2.	Mengupayakan penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu	150	100	60	80	75	465	93
3.	Mengupayakan rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu	90	60	45	60	60	315	63
4.	Mengupayakan peningkatan penilaian MCP KPK terhadap perencanaan dan penganggaran sebesar 100% dan pengelolaan BMD sebesar 95%	120	100	60	80	45	405	81
5.	Adanya perubahan Peraturan Bupati yang mengatur Tupoksi BPKAD yang sebelumnya berdasarkan pada Perbup 64 Tahun 2020 diubah menjadi Perbup 72 Tahun 2021	60	40	30	40	45	215	43
6.	Peningkatan pelayanan dalam percepatan penerbitan SP2D	90	60	45	60	60	315	63



7.	Upaya peningkatan kapasitas SDM pengurus barang dan pengelola keuangan secara terus menerus dan berkelanjutan	120	80	45	60	60	365	73
8.	Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	150	100	60	80	60	450	90

Dari perhitungan diatas, maka yang menjadi program prioritas adalah

Tabel 3.7 Isu Strategis

No	Isu Strategis	Skor
1.	Upaya pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, dll	365
2.	Mengupayakan penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu	465
3.	Mengupayakan rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu	315
4.	Mengupayakan peningkatan penilaian MCP KPK terhadap perencanaan dan penganggaran sebesar 100% dan pengelolaan BMD sebesar 95%	405
5.	Adanya perubahan Peraturan Bupati yang mengatur Tupoksi BPKAD yang sebelumnya berdasarkan pada Perbup 64 Tahun 2020 diubah menjadi Perbup 72 Tahun 2021	215
6.	Peningkatan pelayanan dalam percepatan penerbitan SP2D	315
7.	Upaya peningkatan kapasitas SDM pengurus barang dan pengelola keuangan secara terus menerus dan berkelanjutan	365
8.	Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	450



BAB IV
TUJUAN dan SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD

Tujuan dan sasaran BPKAD merupakan perumusan strategis yang memiliki proiritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKAD selama periode 3 tahun (tahun 2024 s/d 2026) pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKAD. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh BPKAD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan non pendapatan) = 82 %	74,75	75,00	75,25
			Indeks Pengelolaan Aset Daerah	60,00	62,00	64,00



		Meningkatnya Kualitas Akuntabiilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	80,3	80,4	80,5
--	--	---	-------------	------	------	------



BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi untuk pencapaian tujuan melalui pencapaian setiap indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan Analisa SWOT, Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai didalam BPKAD dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor diluar BPKAD yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threasts*) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan sertapeluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT telah menghasilkan arahan atau rekomendaso berupa strategi untuk mencapai tujuan akhir dari misi dan visi BPKAD. Adapun analisis SWOT disajikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 5.1 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD

FAKTOR INTERNAL	Strenghts (S)	Weaknesses (W)
	Terdapat peraturan sebagai dasarmelaksanakan pengelolaan keuangandan aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah dengan menggunakan aplikasi Simda BMD
	Terdapat peraturan tentang Kabijakan Akuntansi Berbasis Akrua	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset berbasisakrua
	Telah dipergunakannya systempengelolaan keuangan daerah dari tahap penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu Simda Keuangan Daerah	Belum optimalnya OPD dalammeyusun anggaran/RKA OPDdengan pendekatanpenganggaran berbasis kinerja atau kurang diperhatikan keterkaitan antara pendanaan dankinerja yang dihapkan
	Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman, dan kebijakan pengelolaan keuangan dan asetdaerah	Terdapat beberapa OPD dalam menyusun RKA kurang memperhatikan dokumen perencanaan, yaitu Renstra OP dan Renja OPD yang berakibat belum sesuai indikator kinerja output dan outcome tercantum dalam RKA OPD
	Penyerapan belanja langsung per triwulan pada PD dipergunakan sebagai salah satu indicator untuk menilai kinerja PD	Penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja daerah yang diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran.



Tabel 5.2 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD

FAKTOR EKSTERNAL	Opportunities (O)	Threats (T)
	Komintmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjadikan BPKAD sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Aturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sering mengalami perubahan dengan cepat
	Komintmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Jombang melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang mengakibatkan data barang milik daerah belum akurat.
	Tuntutan dari masyarakat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat dominan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja lebih profesional, transparan dan akuntabel	Masih terdapat PD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA PD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran
	Pesatnya perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi	Kurang tertibnya tata kelola aset daerah di masing-masing PD / Unit Kerja.



Tabel 5.3 Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategi

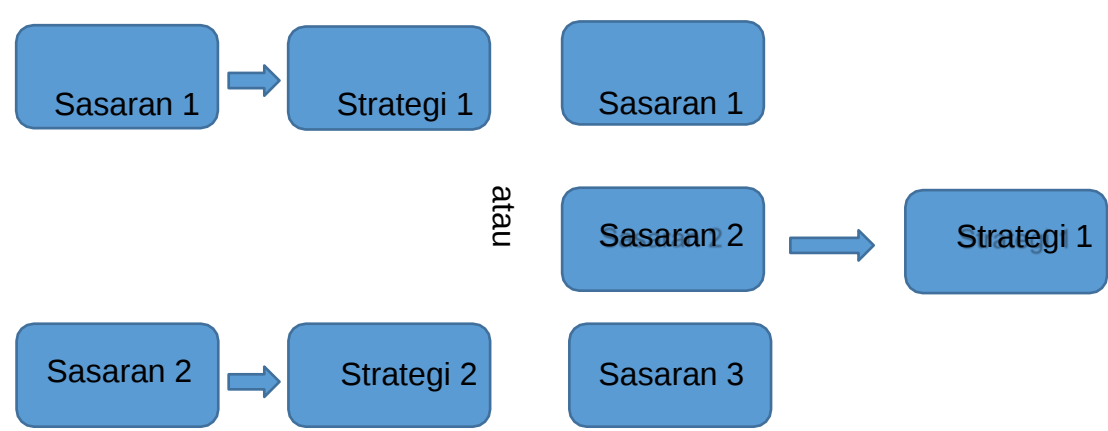
Opportunitites (O)	Strategis S - O	Strategis W - O
Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjadikan BPKAD sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah	Aplikasi yang terintegrasi
Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Jombang melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Meningkatkan kualitas SDM perencanaan di masing-masing OPD/Unit Kerja	Diklat/Bimtek tentang perencanaan OPD/Unit Kerja
Tuntutan dari masyarakat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat dominan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja lebih profesional, transparan dan akuntabel	Pemanfaatan teknologi dan aplikasi sistem	Aplikasi yang terintegrasi
Pesatnya perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi	Terintegrasi pengelolaan BMD dan Keuangan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi yang terintegrasi



Threats (T)	Strategis S-T	Strategis W - T
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang mengakibatkan data barang milik daerah belum akurat.	Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah	Diklat/Bimtek Pengelola Barang Milik Daerah
Kurang tertibnya tata kelola aset daerah di masing-masing PD / Unit Kerja.	Mengintegrasikan pengelolaan BMD dengan pemanfaatan teknologi informasi	Entry data BMD
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap di OPD/Unit Kerja	Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah	Komitmen kepala SKPD/Unit Kerja selaku pengguna/kuasa pengguna barang daerah
Kurang harmonisnya informasi antara pengelola keuangan dan barang di OPD/Unit Kerja	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dan pengelola barang milik daerah	Diklat/Bimtek pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
Keterbatasan SDM pada OPD/Unit Kerja dalam memahami akuntansi pemerintah berbasis akrual	Meningkatkan komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses pengelolaan anggaran belanja daerah	Komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran untuk menegakkan disiplin anggaran

Dari analisis SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu Perangkat Daerah harus dengan tepat dalam memilih strategi, sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut :

Gambar 5.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi



Berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut :



Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD c. Peningkatan Legalisasi Aset Daerah
	Meningkatnya Kualitas Akuntabiilitas Kinerja Instansi Pemerintah		



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Renstra BPKAD Kabupaten Jombang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang 2024-2026, dimana di dalamnya disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah **“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL, INOVATIF, TRANSPARAN, DAN EFEKTIF SERTA PENYELENGGARAAN DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK”**. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut maka tujuan dan sasaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah ***Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi*** disertai dengan sasaran Renstranya yakni ***Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*** dengan Indikator Sasaran yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan non pendapatan) = 82 %, Indeks Pengelolaan Aset Daerah, dan Nilai SAKIP. Selain itu Renstra BPKAD mengalami penyesuaian dan perubahan mengikuti perubahan peraturan yang muncul berdasarka adanya usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan. Karena hal tersebut, terjadi perubahan terhadap Renstra mengikuti terbitnya aturan baru yang tertuang lewat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 untuk disesuaikan dengan Perubahan Renstra pada tahun 2019-2023, Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Tahun 2024-2026.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Jombang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu anggaran selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD Kabupaten Jombang. Indikator kinerja program prioritas yang telah



ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi *outcome* program.

Dalam urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Jombang maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 s/d 2026 adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu dilaksanakan pula program-program lainnya yang dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 s/d 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	75%	0,95	548.211.584.693	0,96	548.528.192.743	0,97	548.798.881.156	0,97	1.645.538.658.592	BPKAD	Kab. Jombang
				Skor Kesesuaian pengalokasian anggaran belanja	75%	1,00		1,00		1,00		1,00		BPKAD	Kab. Jombang
				Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	75%	0,84		0,85		0,86		0,87		BPKAD	Kab. Jombang
				Skor penyerapan anggaran	75%	0,76		0,77		0,78		0,79		BPKAD	Kab. Jombang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Skor Opini BPK atas LKPD	0%	1,00		1,00		1,00		1,00		BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program RKPD dan KUA-PPAS;	100%	100%	1.758.136.800	100%	2.029.988.100	100%	2.227.296.513	100%	6.015.421.413	BPKAD	Kab. Jombang
				Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program KUA_PPAS dan APBD;	30%	100%		100%		100%		100%		BPKAD	Kab. Jombang
				Prosentase Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan	100%	83%		84%		85%		85%		BPKAD	Kab. Jombang
				Prosentase Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.	30%	91%		92%		93%		94%		BPKAD	Kab. Jombang
				Tingkat ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan RPAPBD ke DPRD tepat waktu	30%	100%		100%		100%		100%		BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	2 Dokumen	38.266.000	2 Dokumen	44.005.900	2 Dokumen	47.832.500	6 Dokumen	130.104.400	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	2 Dokumen	37.731.000	2 Dokumen	43.390.650	2 Dokumen	47.163.750	6 Dokumen	128.285.400	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	100 dokumen	1.999.900	100 dokumen	2.854.900	100 dokumen	3.424.900	300 dokumen	8.279.700	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	105 Dokumen	1.999.900	105 Dokumen	3.541.150	105 Dokumen	4.568.650	315 Dokumen	10.109.700	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	100 dokumen	49.279.900	100 dokumen	64.321.900	100 dokumen	74.349.900	300 dokumen	187.951.700	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	105 Dokumen	135.531.000	105 Dokumen	154.544.250	105 Dokumen	167.219.750	315 Dokumen	457.295.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	2 Dokumen	576.354.000	2 Dokumen	662.807.100	2 Dokumen	720.442.500	6 Dokumen	1.959.603.600	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang	100%	2 Dokumen	658.988.000	2 Dokumen	757.837.000	2 Dokumen	823.735.000	6 Dokumen	2.240.560.000	BPKAD	Kab. Jombang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
		5.02.02.2.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	85%	2 Dokumen	59.490.000	2 Dokumen	68.413.500	2 Dokumen	85.516.875	6 Dokumen	213.420.375	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	2 Dokumen	8.930.000	2 Dokumen	10.269.500	2 Dokumen	12.836.875	6 Dokumen	32.036.375	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	2 Dokumen	6.420.000	2 Dokumen	7.383.000	2 Dokumen	9.228.750	6 Dokumen	23.031.750	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100%	2 Dokumen	10.895.000	2 Dokumen	12.529.250	2 Dokumen	15.661.563	6 Dokumen	39.085.813	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	0%	85 Peserta	172.252.100	85 Peserta	198.090.000	85 Peserta	215.315.500	255 Peserta	585.657.600	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota											
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja SKPD	75%	77%	242.595.500	78%	242.595.500	78%	242.595.500	78%	727.786.500	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	71,43 %	112 dokumen	18.948.000	112 dokumen	18.948.000	112 dokumen	18.948.000	336 dokumen	56.844.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	63,48 %	10000 dokumen	51.354.000	10050 dokumen	51.354.000	10050 dokumen	51.354.000	30100 dokumen	154.062.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100%	5 dokumen	9.354.000	5 dokumen	9.354.000	5 dokumen	9.354.000	15 dokumen	28.062.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	-	9 dokumen	5.250.000	9 dokumen	5.250.000	9 dokumen	5.250.000	27 dokumen	15.750.000	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Transfer Lainnya											
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%	7074 Laporan	3.857.500	7074 Laporan	3.857.500	7074 Laporan	3.857.500	21222 Laporan	11.572.500	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan	100%	11 Dokumen	5.866.000	11 Dokumen	5.866.000	11 Dokumen	5.866.000	11 Dokumen	17.598.000	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggunjab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas											
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasl Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	75%	200 dokumen rekon	74.436.000	200 dokumen rekon	74.436.000	200 dokumen rekon	74.436.000	600 dokumen rekon	223.308.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	100%	4 (kali) kegiatan coaching, 1 dokumen pelaksanaan APBD	73.530.000	4 (kali) kegiatan coaching, 1 dokumen pelaksanaan APBD	73.530.000	4 (kali) kegiatan coaching, 1 dokumen pelaksanaan APBD	73.530.000	12 (kali) kegiatan coaching, 3 dokumen pelaksanaan APBD	220.590.000	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan											
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja Bantuan Keuangan, BTT dan Dana Bagi Hasil	100%	100%	545.522.484.143	100%	545.522.484.143	100%	545.522.484.143	100%	1.636.567.452.429	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	12 Laporan	509.734.340.053	12 Laporan	509.734.340.053	12 Laporan	509.734.340.053	100%	1.529.203.020.159	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	1 Laporan	19.958.814.109	1 Laporan	19.958.814.109	1 Laporan	19.958.814.109	100%	59.876.442.327	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	1 Laporan	15.829.329.981	1 Laporan	15.829.329.981	1 Laporan	15.829.329.981	100%	47.487.989.943	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Prosentase OPD yang menyusun LK OPD tepat waktu	100%	76%	688.368.250	77%	733.125.000	78%	806.505.000	78%	2.227.998.250	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggunjab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Keuangan Daerah												
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%	12 dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6.760.000	12 dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7.436.000	12 dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8.179.000	12 dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	22.375.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%	4 dokumen rekonsiliasi LRA-LO-Neraca SKPD	6.010.000	4dokumen rekonsiliasi LRA-LO-Neraca SKPD	6.600.000	4 dokumen rekonsiliasi LRA-LO-Neraca SKPD	7.300.000	4 dokumen rekonsiliasi LRA-LO-Neraca SKPD	19.910.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	16 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Tribulanan dan Semester	5.060.000	16 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Tribulanan dan Semester	5.566.000	16 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Tribulanan dan Semester	6.150.000	16 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Tribulanan dan Semester	16.776.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	100%	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	82.232.300	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	90.455.000	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	99.500.000	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	272.187.300	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggunjab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi											
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjababan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjababan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kotaa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kotaa dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjababan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kotaa	100%	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintaha Daerah	240.664.000	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintaha Daerah	240.664.000	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintaha Daerah	264.730.000	2 Dokumen Laporan Keuangan Pemerintaha Daerah	746.058.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.03.09	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjababan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintaha Daerah	91.950.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintaha Daerah	101.145.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintaha Daerah	111.260.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintaha Daerah	304.355.000	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pertanggungwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a												
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	139.990.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	153.989.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	169.387.000	1 dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	463.366.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungwaban Pemerintah Kabupaten/Kot a	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungwaban Pemerintah Kabupaten/Kot a	50%	2 bimtek dan 1 rapat teknis	115.701.950	2 bimtek dan 1 rapat teknis	127.270.000	2 bimtek dan 1 rapat teknis	139.999.000	2 bimtek dan 1 rapat teknis	382.970.950	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu	75%	93%	2.590.258.650	94%	2.738.546.760	95%	2.805.101.303	95%	8.133.906.713	BPKAD	Kab. Jombang
				Peningkatan capaian pemanfaatan aset	75%	13%		14%		15%		15%	-	BPKAD	Kab. Jombang
				Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	75%	11%		12%		13%		13%	-	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang tertib tata kelola BMD	51,18 %	86%	2.590.258.650	87%	2.738.546.760	88%	2.805.101.303	88%	8.133.906.713	BPKAD	Kab. Jombang
				Prosentase pengelolaan aset yang dimanfaatkan	92,31 %	66%		67%		68%		68%	-	BPKAD	Kab. Jombang
				Prosentase pengajuan sertifikasi aset daerah	100%	41%		42%		43%		43%	-	BPKAD	Kab. Jombang
				Prosentase aset daerah yang terinventarisasi dalam laporan BMD tematik tahunan	100%	66%		67%		68%		68%	-	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100%	150 Dokumen SSH Reguler dan dokumen SSH PAPBD, Jasa konsultasi untuk SSH Reguler dan SSH PAPBD	199.075.000	75 SSH Reguler, 75 SSH PAPBD, Jasa konsultasi untuk SSH Reguler dan SSH PAPBD	199.075.000	75 SSH Reguler, 75 SSH PAPBD, Jasa konsultasi untuk SSH Reguler dan SSH PAPBD	199.075.000	450 SSH Reguler dan SSH PAPBD, Jasa konsultasi untuk SSH Reguler dan SSH PAPBD	597.225.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	100%	70 Cetak SBSK, Biaya jasa konsultasi	65.750.000	70 Cetak SBSK, Biaya jasa konsultasi	65.750.000	70 Cetak SBSK, Biaya jasa konsultasi	65.750.000	210 Cetak SBSK, Biaya jasa konsultasi	197.250.000	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gungja wab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah											
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	1 Dokumen RKBMD	23.012.500	1 Dokumen RKBMD	23.012.500	1 Dokumen RKBMD	23.012.500	3 Dokumen RKBMD	69.037.500	BPKAD	Kab. Jomba ng
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	2 dokumen perbub, narasumbe r	90.700.000	2 dokumen perbub, narasumbe r	90.700.000	2 dokumen perbub, narasumbe r	90.700.000	6 dokumen perbub, narasumbe r	272.100.000	BPKAD	Kab. Jomba ng
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	75%	2 Laporan Semesteran Penatausa haan BMD	286.024.000	2 Laporan Semesteran Penatausa haan BMD	381.191.200	2 Laporan Semesteran Penatausa haan BMD	495.548.560	6 Laporan Semesteran Penatausa haan BMD	1.162.763.760	BPKAD	Kab. Jomba ng
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	100%	1 Laporan Hasil Inventaris asi BMD	29.799.000	1 Laporan Hasil Inventaris asi BMD	29.799.000	1 Laporan Hasil Inventaris asi BMD	29.799.000	3 Laporan Hasil Inventaris asi BMD	89.397.000	BPKAD	Kab. Jomba ng
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	450 Laporan	1.008.270.000	450 Laporan	1.008.270.000	450 Laporan	891.410.000	1350 Laporan	2.907.950.000	BPKAD	Kab. Jomba ng
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100%	5 Dokumen Penilaian	328.948.450	5 Dokumen Penilaian	328.948.450	5 Dokumen Penilaian	328.948.450	15 Dokumen Penilaian	986.845.350	BPKAD	Kab. Jomba ng



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1 Laporan	37.735.000	1 Laporan	37.735.000	1 Laporan	37.735.000	3 Laporan	113.205.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	1 Dokumen	343.875.000	1 Dokumen	343.875.000	1 Dokumen	343.875.000	3 Dokumen	1.031.625.000	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	70%	4 Laporan	30.220.000	4 Laporan	39.286.000	4 Laporan	51.071.800	12 Laporan	120.577.800	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100%	4 Laporan	21.548.700	4 Laporan	28.013.310	4 Laporan	36.417.303	12 Laporan	85.979.313	BPKAD	Kab. Jombang
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	100%	97 Orang	125.301.000	97 Orang	162.891.300	97 Orang	211.758.690	291 Orang	499.950.990	BPKAD	Kab. Jombang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kabupaten/Kota	Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	75%	100%	51.111.483.762	100%	50.881.483.762	100%	50.901.483.762	100%	152.894.451.286	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	75%	100%	90.000.000	100%	110.000.000	100%	130.000.000	100%	330.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75%	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	70.000.000	6 Dokumen	180.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	5 Laporan	40.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	60.000.000	15 Laporan	150.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	75%	100%	49.031.983.576	100%	49.031.983.576	100%	49.031.983.576	100%	147.095.950.728	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75%	Pembayaran gaji dan tunjangan	48.562.801.576	Pembayaran gaji dan tunjangan	48.562.801.576	Pembayaran gaji dan tunjangan	48.562.801.576	Pembayaran gaji dan tunjangan	145.688.404.728	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						PNS untuk 12 bulan		PNS untuk 12 bulan		PNS untuk 12 bulan		PNS untuk 36 bulan			
		x.xx.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75%	4 Dokumen Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Jasa Pengelolaa n BMD	461.682.000	4 Dokumen Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Jasa Pengelolaa n BMD	461.682.000	4 Dokumen Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Jasa Pengelolaa n BMD	461.682.000	12 Dokumen Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Jasa Pengelolaa n BMD	1.385.046.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75%	1 Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan lampiran pendukungnya	2.500.000	1 Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan lampiran pendukungnya	2.500.000	1 Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan lampiran pendukungnya	2.500.000	3 Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan lampiran pendukungnya	7.500.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	75%	18 Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan,	5.000.000	18 Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan,	5.000.000	18 Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan,	5.000.000	54 Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan,	15.000.000	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			anan/Semester an SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD		semester dan prognosis		semester dan prognosis		semester dan prognosis		semester dan prognosis			
		x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	75%	100%	1.339.500.000	100%	1.339.500.000	100%	1.339.500.000	100%	4.018.500.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75%	3 Paket Pemeliharaan jaringan listrik dan telekomunikasi	25.000.000	3 Paket Pemeliharaan jaringan listrik dan telekomunikasi	25.000.000	3 Paket Pemeliharaan jaringan listrik dan telekomunikasi	25.000.000	9 Paket Pemeliharaan jaringan listrik dan telekomunikasi	75.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75%	5 Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	722.500.000	5 Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	722.500.000	5 Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	722.500.000	15 Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.167.500.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75%	4 Paket penyediaan peralatan rumah tangga	130.000.000	4 Paket penyediaan peralatan rumah tangga	130.000.000	4 Paket penyediaan peralatan rumah tangga	130.000.000	12 Paket penyediaan peralatan rumah tangga	390.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75%	4 Paket penyediaan bahan bakar minyak	285.000.000	4 Paket penyediaan bahan bakar minyak	285.000.000	4 Paket penyediaan bahan bakar minyak	285.000.000	12 Paket penyediaan bahan bakar minyak	855.000.000	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						dan makanan/minuman rapat, jamuan tamu dan penambah daya tahan tubuh		dan makanan/minuman rapat, jamuan tamu dan penambah daya tahan tubuh		dan makanan/minuman rapat, jamuan tamu dan penambah daya tahan tubuh		dan makanan/minuman rapat, jamuan tamu dan penambah daya tahan tubuh			
		x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75%	3 Paket barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	3 Paket barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	3 Paket barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	9 Paket barang cetakan dan penggandaan	66.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	75%	2 Dokumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	2 Dokumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	2 Dokumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	6 Dokumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75%	1 Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	145.000.000	1 Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	145.000.000	1 Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	145.000.000	3 Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	435.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang	75%	100%	650.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.450.000.000	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pemerintah Daerah	kinerja pelayanan											
		x.xx.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75%	10 Unit Pembaharuan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	650.000.000	10 Unit Pembaharuan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	400.000.000	10 Unit Pembaharuan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	400.000.000	30 Unit Pembaharuan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	1.450.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	75%	100%	315.000.000	100%	365.000.000	100%	365.000.000	100%	1.045.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75%	1 Laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	1 Laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	1 Laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	3 Laporan penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75%	2 Laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	200.000.000	2 Laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	250.000.000	2 Laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	250.000.000	6 Laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	700.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75%	3 Laporan pembayaran jaminan kesehatan, pajak, bea dan perizinan	110.000.000	3 Laporan pembayaran jaminan kesehatan, pajak, bea dan perizinan	110.000.000	3 Laporan pembayaran jaminan kesehatan, pajak, bea dan perizinan	110.000.000	9 Laporan pembayaran jaminan kesehatan, pajak, bea dan perizinan	330.000.000	BPKAD	Kab. Jombang



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	75%	100%	405.000.000	100%	405.000.000	100%	410.000.000	100%	1.220.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75%	24 unit pembayar an pajak berkala kendaraan dinas roda 2	40.000.000	24 unit pembayar an pajak berkala kendaraan dinas roda 2	40.000.000	24 unit pembayar an pajak berkala kendaraan dinas roda 2	40.000.000	72 unit pembayar an pajak berkala kendaraan dinas roda 2	120.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75%	5 unit pembayar an pajak, perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	110.000.000	5 unit pembayar an pajak, perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	110.000.000	5 unit pembayar an pajak, perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	110.000.000	15 unit pembayar an pajak, perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	330.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	75%	2 Unit pemeliharaan gedung kantor dan record center	130.000.000	2 Unit pemeliharaan gedung kantor dan record center	130.000.000	2 Unit pemeliharaan gedung kantor dan record center	130.000.000	6 Unit pemeliharaan gedung kantor dan record center	390.000.000	BPKAD	Kab. Jombang
		x.xx.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	75%	10 unit pemeliharaan sarana dan	125.000.000	10 unit pemeliharaan sarana dan	125.000.000	10 unit pemeliharaan sarana dan	130.000.000	30 unit pemeliharaan sarana dan	380.000.000	BPKAD	Kab. Jombang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		prasarana gedung kantor		prasarana gedung kantor		prasarana gedung kantor		prasarana gedung kantor			



Tabel 6.2 Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Jombang pada tahun 2024 s/d 2026

No	Program Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (3 kegiatan)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Aset Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Laporan SKPD Kinerja
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (1 kegiatan)				
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (6 kegiatan)				Peningkatan apasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.
					Peningkatan Legalisasi Aset Daerah

Dari Tabel Tabel 5.1 tentang Program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat kita lihat bahwa dalam periode 2024 s/d 2026 ada 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ini saling mendukung untuk mewujudkan tujuan Utama dari Renstra BPKAD yakni *Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan*.



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja BPKAD

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik dalam hal mengelola keuangan dan aset daerah maka BPKAD Kabupaten Jombang dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, BPKAD Kabupaten Jombang juga diminta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Tujuan organisasi yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi terkini di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Jombang sesuai dengan rencana program pembangunan. Tabel 7.1 berikut ini berisi indikator kinerja BPKAD Kabupaten Jombang yang mengacu pada tujuan dan sasaran BPKAD Kab. Jombang.

Tabel 7.1 Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

Indikator Kinerja BPKAD	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan non pendapatan) = 82 %	75,86	74,75	75,00	75,25	75,25
2. Indeks Pengelolaan Aset Daerah	62,20	60,00	62,00	64,00	64,00
3. Nilai SAKIP	80,48	80,3	80,4	80,5	80,5



Tabel 7.2 Program Prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024 s/d 2026

No.	Program Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Peningkatan Legalisasi Aset Daerah

Dari Tabel 7.2 diatas dapat kita diamati bahwa Program Prioritas yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Jombang sejalan dengan Peningkatan Kuliats Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan publik yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, transparan, efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi terkini di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.



BAB VIII

P E N U T U P

Revisi Rancangan Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Melalui dokumen tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang selama kurun waktu tiga tahun (2024 s/d 2026) dalam menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani. Keberhasilan atau kegagalan pelayanan yang diselenggarakan dapat diukur dengan tercapai atau tidaknya indikator kinerja sari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAD yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama dan indikator kinerja (*outcome*) dari program inti/utama yang dilaksanakan guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang terkandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

Di dalam dokumen RPD Tahun 2024 s/d 2026 pada bagian kaidah pelaksanaan disebutkan bahwa Seluruh organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Kabupaten Jombang agar melaksanakan kebijakan dan program dalam RPD Kabupaten Jombang dengan sebaik-baiknya. Selain itu Organisasi perangkat Daerah juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Lokasi, capaian kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang di susun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026.